

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA
DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2013

**RENCANA AKSI
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	
			3	4
1	A	KEMENTERIAN DALAM NEGERI		
1	ACEH			
	Kota Sabang	Pembangunan sarana dan prasarana perbatasan antar negara	Rp.	62.000.000,000
			Rp.	1.500.000,000
			Rp.	1.500.000,000
2	SUMATERA UTARA			
	Kab. Siantar	PNPM Mandiri perdesaan wilayah perbatasan	Rp.	1.000.000,000
			Rp.	1.000.000,000
3	RIAU			
	Kab. Bengkalis	PNPM Mandiri perdesaan wilayah perbatasan	Rp.	3.000.000,000
			Rp.	1.000.000,000
	Kab. Indragiri Hilir	PNPM Mandiri perdesaan wilayah perbatasan	Rp.	2.000.000,000
	Kab. Kep. Meranti	PNPM Mandiri perdesaan wilayah perbatasan	Rp.	2.000.000,000
4	KEPULAUAN RIAU			
		Pembangunan kantor perbatasan Provinsi	Rp.	9.700.000,000
			Rp.	2.200.000,000
	Kab. Natuna	1. Pembangunan sarana dan prasarana perbatasan antar negara 2. PNPM Mandiri perdesaan wilayah perbatasan	Rp.	2.000.000,000
			Rp.	1.000.000,000
	Kab. Kepulauan Anambas	1. Pembangunan sarana dan prasarana perbatasan antar negara 2. PNPM Mandiri perdesaan wilayah perbatasan	Rp.	2.000.000,000
			Rp.	1.000.000,000
	Kab. Bintan	Pembangunan sarana dan prasarana perbatasan antar negara	Rp.	1.500.000,000
5	KALIMANTAN BARAT			
		Pembangunan kantor perbatasan Provinsi	Rp.	14.600.000,000
			Rp.	2.200.000,000

NO	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4
	Kab. Sambas	Pembangunan sarana dan prasarana perbatasan antar negara	Rp. 2.200.000.000
	Kab. Bengkayang	1. Pembangunan sarana dan prasarana perbatasan antar negara 2. PNPM Mandiri perdesaan wilayah perbatasan	Rp. 2.000.000.000 Rp. 1.000.000.000
	Kab. Sanggau	1. Pembangunan sarana dan prasarana perbatasan antar negara 2. PNPM Mandiri perdesaan wilayah perbatasan	Rp. 2.000.000.000 Rp. 1.000.000.000
	Kab. Sintang	Pembangunan sarana dan prasarana perbatasan antar negara	Rp. 2.000.000.000
	Kab. Kapuas Hulu	Pembangunan sarana dan prasarana perbatasan antar negara	Rp. 2.200.000.000
6	KALIMANTAN TIMUR		
	Kab. Mahakam	1. Pembangunan sarana dan prasarana perbatasan antar negara 2. PNPM Mandiri perdesaan wilayah perbatasan	Rp. 9.000.000.000 Rp. 2.000.000.000 Rp. 1.000.000.000
	Kab. Kutai Barat	PNPM Mandiri perdesaan wilayah perbatasan	Rp. 2.000.000.000
	Kab. Nunukan	1. Pembangunan sarana dan prasarana perbatasan antar negara 2. PNPM Mandiri perdesaan wilayah perbatasan	Rp. 2.000.000.000 Rp. 2.000.000.000
7	NUSA TENGGARA TIMUR		
		Pembangunan kantor perbatasan Provinsi	Rp. 9.000.000.000 Rp. 2.400.000.000
	Kota Kupang	Pembangunan sarana dan prasarana perbatasan antar negara	Rp. 1.700.000.000
	Kab. Timor Tengah Utara	1. Pembangunan sarana dan prasarana perbatasan antar negara 2. PNPM Mandiri perdesaan wilayah perbatasan	Rp. 1.700.000.000 Rp. 1.000.000.000
	Kab. Nte Ndao	PNPM Mandiri perdesaan wilayah perbatasan	Rp. 1.000.000.000
	Kab. Belu	Pembangunan sarana dan prasarana perbatasan antar negara	Rp. 1.800.000.000

NO	PROVINSI KAB./PATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	1
8	SULAWESI UTARA		Rp. 1.000.000.000
		Pembangunan kantor perbatasan Provinsi	Rp. 2.000.000.000
	Kab. kep. Sangihe	Pembangunan sarana dan prasarana perbatasan antar negara	Rp. 1.000.000.000
	Kab. Kep. Talaud	PNPM Mandiri pemetaan wilayah perbatasan	Rp. 1.000.000.000
9	MALUKU		Rp. 1.000.000.000
	Kab. Maluku Tenggara Barat	Pembangunan sarana dan prasarana perbatasan antar negara	Rp. 1.000.000.000
10	PAPUA		Rp. 5.000.000.000
	Kab. Merauke	Pembangunan sarana dan prasarana perbatasan antar negara	Rp. 2.000.000.000
	Kab. Pegunungan Bintang	Pembangunan sarana dan prasarana perbatasan antar negara	Rp. 2.000.000.000
	Kab. Keerom	Pembangunan sarana dan prasarana perbatasan antar negara	Rp. 2.000.000.000
11	PAPUA BARAT		Rp. 1.500.000.000
		Pembangunan kantor perbatasan Provinsi	Rp. 1.500.000.000

NO	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1		3	1
B	KEMENTERIAN PERTANIAN		Rp. 21.000.000.000
1	PAPUA		Rp. 21.000.000.000
	Papua	1. Pos Mepun	Rp. 2.500.000.000
		2. Pos Kahar	Rp. 2.500.000.000
		3. Pos Sungai Saungar	Rp. 2.500.000.000
		4. Pos Sungai Cini	Rp. 2.500.000.000
		5. Pos Darun Dayong	Rp. 2.500.000.000
		6. Pos Hulu Iwan	Rp. 2.500.000.000
		7. Pos Kalup Keream	Rp. 3.000.000.000
		8. Pos Jageboh XI Meranke	Rp. 3.000.000.000
C	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI		Rp. 551.213.472.000
1	ACEH		Rp. 1.453.877.000
	Kota Sabang	Pengelolaan administratif, pelayanan dan penegakan hukum dan HAM	Rp. 1.453.877.000
2	RIAU		Rp. 11.814.067.000
	Kec. Pembilehan	Pengelolaan administratif, pelayanan dan penegakan hukum dan HAM Kantor wilayah	Rp. 2.712.451.000
	Kab. Bengkalis	Pengelolaan administratif, pelayanan dan penegakan hukum dan HAM	Rp. 2.896.510.000
	Kota Dumai	Pengelolaan administratif, pelayanan dan penegakan hukum dan HAM Kantor wilayah	Rp. 6.205.106.000
3	KEPULAUAN RIAU		Rp. 2.566.883.000
	Batangkang Padang	Pengelolaan administratif, pelayanan dan penegakan hukum dan HAM	Rp. 2.566.883.000

NO	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	1
4	KALIMANTAN BARAT		Rp. 12.711.331.000
	Sambas	Pengelolaan administratif, pelayanan dan penegakan hukum dan HAM	Rp. 3.211.733.000
	Endikong	Pengelolaan administratif, pelayanan dan penegakan hukum dan HAM	Rp. 1.059.683.000
	Sanggau	Pengelolaan administratif, pelayanan dan penegakan hukum dan HAM	Rp. 3.459.913.000
5	KALIMANTAN TIMUR		Rp. 6.731.047.000
	Kunukan	Pengelolaan administratif, pelayanan dan penegakan hukum dan HAM	Rp. 6.731.047.000
6	KUSA TENGGARA TIMUR		Rp. 4.260.821.000
	Atambua	Pengelolaan administratif, pelayanan dan penegakan hukum dan HAM	Rp. 4.260.821.000
7	SULAWESI UTARA		Rp. 5.762.042.000
	Marado	Pengelolaan administratif, pelayanan dan penegakan hukum dan HAM	Rp. 5.762.042.000
8	PAPUA		Rp. 7.883.402.000
	Jayapura	Pengelolaan administratif, pelayanan dan penegakan hukum dan HAM	Rp. 4.533.662.000
	Meeruke	Pengelolaan administratif, pelayanan dan penegakan hukum dan HAM	Rp. 3.349.740.000